

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika perubahan jaman akibat arus modernisasi dan globalisasi membawa dampak masalah sosial baru. Masalah sosial merupakan “suatu kondisi yang dirasakan tidak menyenangkan bagi kebanyakan orang serta menyimpang dari norma dan aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang membutuhkan solusi secepatnya”.¹ Masalah sosial yang tidak kunjung tuntas hingga saat ini adalah masalah ketelantaran, kemiskinan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, kecacatan, keterpencilan, korban tindak kekerasan, korban bencana, eksploitasi, serta diskriminasi. Mereka yang mengalami masalah sosial tersebut dan memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).² Secara umum, timbulnya masalah-masalah kesejahteraan sosial, menurut Samsul Bahri, umumnya dikarenakan dua faktor berikut:

1. Faktor dari dalam diri individu, contohnya akibat fisik yang cacat membuat individu tidak dapat melaksanakan fungsi sosial.
2. Faktor dari luar diri individu, contohnya lingkungan sosial maupun lingkungan fisik.³

Hambatan yang menjadikan dasar terjadinya masalah kesejahteraan sosial terdapat lima macam, yaitu:⁴

1. Ketergantungan ekonomi.

¹ Pusdatin Kesos, Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Departemen Sosial RI, 2009), 89, <https://www.kemosos.go.id>.

² Peraturan Menteri Sosial RI, “8 Tahun 2012, Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial”, 7 Juni 2012, Bab III pasal 6.

³ Samsul Bahri, “Strategi Komunikasi Dinas Kesejahteraan Sosial dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Samarinda”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2015, 3 (2): 234, ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id.

⁴ Samsul Bahri, “Strategi Komunikasi Dinas Kesejahteraan Sosial...”, 235.

2. Kondisi kesehatan yang tidak baik.
3. Tidak mampu menyesuaikan diri.
4. Minimnya pengisian waktu senggang dan pengadaan rekreasi.
5. Keadaan sosial, di mana pengelolaan dan penyediaan layanan sosial yang ada kurang baik atau tidak baik.

PMKS dalam menjalankan fungsi sosialnya mengalami gangguan, yang berakibat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Penanggulangan permasalahan PMKS merupakan tanggung jawab negara. Sebagaimana tertuang pada Undang-undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 4 menerangkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sedangkan pada pasal 5 dijelaskan bahwa:⁵

1. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: a) perseorangan, b) keluarga, c) kelompok, d) masyarakat.
2. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: a) kemiskinan, b) ketelantaran, c) kecacatan, d) keterpencilan, e) ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, f) korban bencana, g) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945, merupakan cita-cita kemerdekaan dan menjadi tanggung jawab negara. Dalam era otonomi daerah, pembangunan kesejahteraan sosial tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait tetapi juga menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.⁶ Dinas Sosial Kabupaten Kudus sebagai satuan kerja yang menangani bidang sosial, menjalankan tugas pokok untuk menangani PMKS di

⁵ Undang-undang RI, “11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial,” 16 Januari 2009.

⁶ Muhammad Sahrul, “Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Depok”, Kajian, Volume 28, Nomor 1, Januari 2017: 61.

wilayah Kabupaten Kudus. Meningkatnya kuantitas PMKS jalanan di Kudus dengan berbagai problematikanya, meningkatnya pengangguran seiring dengan semakin menyempitnya peluang kerja serta eksek lainnya merupakan problema yang perlu segera ditanggulangi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kudus.⁷

PMKS merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian dan dukungan khusus dari pihak lain agar bisa kembali menjadi pribadi yang sehat dan tangguh. Permasalahan psikologis dan ekonomi yang membelit mereka membawa dampak negatif pada kesehatan mental dan fisiknya. Mereka rentan dilanda stress. Dalam tinjauan psikologis, stress dapat diartikan sebagai “suatu kondisi yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan”.⁸ Akibat parahnya, jika mereka frustrasi, seringkali upaya mereka keluar dari kegetiran hidup terkadang dengan cara yang tidak bisa diterima oleh kebanyakan orang. Mereka nekat melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri mereka maupun orang di sekitar mereka.⁹ Negara melakukan beberapa tindakan sebagai upaya mengentaskan masalah yang membelit PMKS demi tercapainya kesejahteraan sosial bagi mereka. Tindakan tersebut tercantum dalam Undang-undang RI mengenai Kesejahteraan Sosial, yaitu pasal 6, yang menerangkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: 1. rehabilitasi sosial, 2. jaminan sosial, 3. pemberdayaan sosial, 4. Perlindungan sosial.¹⁰

Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Kudus dalam menangani masalah PMKS, salah satu agenda kegiatannya adalah bimbingan rohani Islam (bimbingan mental spiritual) bagi para PMKS. Untuk itu, Dinas Sosial Kabupaten Kudus bekerja sama dengan balai rehabilitasi sosial

⁷ Renstra Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah 2013-2018, 1

⁸ Siti Nur Asiyah, *Psikologi Kesehatan* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 95.

⁹ Rodemeus Ristyantoro, “Masalah Kesejahteraan Sosial”, *Suara Pembaruan*, 28 Agustus 2010.

¹⁰ Undang-undang RI, “11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial”, pasal 6.

sebagai lembaga yang bertanggungjawab melakukan upaya mencapai kesejahteraan sosial di masyarakat.¹¹ Dalam prakteknya bimbingan rohani Islam ini bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk aktivitas bergantung pada kewenangan balai rehabilitasi sosial. Bimbingan rohani Islam yang diberikan pada PMKS di antaranya dapat berupa bimbingan keagamaan (spiritual), bimbingan budi pekerti, dan kepribadian.¹²

Bimbingan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran beragama pada PMKS. Dengan taat beragama, PMKS akan memperoleh pencerahan dalam pola berpikirnya sehingga memperoleh kedamaian dan ketentraman jiwa. Farid Mashudi menuturkan bahwa, “dalam upaya agar dapat mengembangkan kesehatan mental dan meredam gejala gangguan kejiwaan yang dilakukan melalui cara meningkatkan kesadaran beragama masyarakat. Agama dapat mencerahkan pola berpikir seseorang menuju kehidupan yang *sakinah, mawaddah, rohmah, dan ukhuwah*”.¹³ Pemberian bimbingan rohani Islam, diharapkan mampu membuat PMKS menghadapi masalahnya dengan baik. Kondisi psikologis mereka bisa pulih dan mampu menjalani kehidupan sosial bermasyarakat secara wajar. Menurut Farid Mashudi, “individu yang memiliki keimanan pada Tuhan atau taat pada agama akan mampu mengelola kehidupannya secara wajar, sehat, dan normatif, juga mampu mengelola kondisi stress secara positif dan konstruktif”.¹⁴ Wawan Susetya juga berpendapat sama, bahwa dengan keimanan yang mendalam, ketika kaum muslimin menjalankan ibadah, tentu akan melahirkan ketulusan, ketentraman, kelembutan hati, kedamaian jiwa, kejernihan pikiran, empati kepada sesama, dan seterusnya. Dengan

¹¹ Peraturan Pemerintah RI, “39 Tahun 2012, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”, 5 Maret 2012, pasal 7 dan pasal 8.

¹² Ema Hidayanti, “Optimalisasi Pelayanan Bimbingan dan Konseling Agama Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)” *Dimas* Vol. 13, No. 2 (2013) : 362.

¹³ Farid Mashudi, *Psikologi Konseling: Buku Panduan Lengkap dan Praktis Menerapkan Psikologi Konseling* (Yogyakarta: IRCiSoD, Cet. III, 2013), 178.

¹⁴ Farid Mashudi, *Psikologi Konseling*, 233.

demikian segala ekses modernisasi yang berdampak pada kehidupan manusia tentunya tidak berpengaruh negatif bagi kaum muslimin sejati.¹⁵

Sejatinya, hal mendasar yang perlu dilakukan pada PMKS adalah memulihkan kembali kepercayaan diri, harga diri, kemampuan dan kemauan para PMKS dalam melakukan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi di samping bimbingan rohani Islam, tentunya bimbingan ketrampilan serta bantuan pemberdayaan lainnya dari Dinas Sosial sangat membantu PMKS sebagai bekal mereka dalam hidup bermasyarakat secara normatif.¹⁶ Dari bahasan yang diuraikan di atas, timbul ketertarikan melakukan penelitian skripsi dengan judul “Bimbingan Rohani Islam oleh Dinas Sosial Kabupaten Kudus pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, agar tidak melebar permasalahannya, maka penelitian lebih difokuskan pada pelaksanaan bimbingan rohani Islam yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Kudus pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

C. Rumusan Masalah

Dari fokus penelitian yang telah disampaikan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan bimbingan rohani Islam yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Kudus pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)?
2. Apa saja kendala dan dampak pelaksanaan kegiatan bimbingan rohani Islam yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Kudus dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)?

¹⁵ Wawan Susetya, *Fungsi-fungsi Terapi Psikologis dan Medis Di Balik Puasa Senin-Kamis* (Yogyakarta: Diva Press, 2008), 165.

¹⁶ Dokumen Panti Sosial Karya Wanita (PKSW) UPTD Dinas Sosial Propinsi DIY.

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana uraian rumusan masalah yang diutarakan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan bimbingan rohani Islam yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Kudus pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dan dampak pelaksanaan kegiatan bimbingan rohani Islam yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kudus dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini semoga dapat diambil manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Bermanfaat untuk mengembangkan khasanah pengetahuan yang dapat mendukung teori-teori yang telah ada yang ada kaitannya dengan bimbingan rohani Islam dalam menangani masalah PMKS.
 - b. Sebagai referensi untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan relevan bagi peneliti lain.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi pembimbing rohani, bisa dijadikan referensi untuk mengembangkan metode bimbingan rohani Islam sebagai salah satu metode untuk membantu PMKS dalam memulihkan kondisi psikologisnya.
 - b. Bagi dinas sosial, dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya menanggulangi masalah PMKS
 - c. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan keilmuan sehingga dapat bermanfaat dalam pengembangan penelitian pendidikan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab satu diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pembahasan pada bab dua terdiri dari:

1. Teori-Teori yang berhubungan dengan judul, berisi bimbingan rohani Islam, penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan bimbingan rohani Islam dalam menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Penelitian Terdahulu, berisi hasil-hasil penelitian yang pernah dilaksanakan sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.
3. Kerangka Berpikir, berisi bagan yang menggambarkan hubungan antara kegiatan bimbingan rohani Islam dan penanggulangan masalah PMKS yang ditangani Dinas Sosial Kabupaten Kudus.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab tiga dijelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab empat dibahas tentang :

1. Profil Dinas Sosial Kabupaten Kudus. menjelaskan tentang Sejarah Singkat Dinas Sosial Kabupaten Kudus, Letak Geografis, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Keadaan PMKS Kabupaten Kudus.
2. Temuan Penelitian, menguraikan tentang pelaksanaan kegiatan bimbingan rohani Islam yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Kudus pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Kendala dan dampak pelaksanaan kegiatan bimbingan rohani Islam yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Kudus dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Pembahasan Penelitian, berisi analisis pelaksanaan kegiatan bimbingan rohani Islam

yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Kudus pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta analisis kendala dan dampak pelaksanaan kegiatan bimbingan rohani Islam yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Kudus dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

BAB V : PENUTUP

Membahas mengenai simpulan dan saran dari peneliti yang didasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan.

